



KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG

Herlina Juita

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensi dan kompleks, sehingga penanganannya memerlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Di Kota Tangerang, tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, namun upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek implementasi kebijakan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pelaksanaan program bantuan sosial, peningkatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, keterbatasan akurasi data kelompok miskin dan rentan, fragmentasi program lintas perangkat daerah, serta dominasi pendekatan bantuan sosial yang bersifat konsumtif menjadi kendala utama dalam mencapai hasil yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan basis data terpadu, integrasi kebijakan lintas sektor, serta pemberdayaan ekonomi produktif berbasis wilayah menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pengentasan kemiskinan, kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi, Kota Tangerang.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensi dan kompleks, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Menurut Todaro et al.

(2015), inti dari seluruh permasalahan pembangunan adalah kemiskinan yang meluas. Kondisi ini menjadikan kemiskinan sebagai isu fundamental yang terus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural saling

berinteraksi dalam mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan.

Untuk memahami kondisi kemiskinan perkotaan di Kota Tangerang secara lebih komprehensif, diperlukan gambaran awal mengenai karakteristik kependudukan wilayah tersebut. Profil demografis, menjadi penting karena dinamika jumlah penduduk, kepadatan, serta laju pertumbuhan penduduk berpengaruh langsung terhadap tekanan terhadap lapangan kerja, perumahan, dan pelayanan dasar. Tiga kecamatan beban tertinggi Neglasari, Karawaci, dan Pinang menyumbang lebih dari sepertiga total penduduk miskin kota Tangerang. Selain itu, Jumlah usia produktif yang tidak bekerja atau tidak sekolah (pengangguran dan putus sekolah), yang menjadi faktor kunci dalam siklus kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **analisis kebijakan publik (policy analysis)**. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis permasalahan kemiskinan perkotaan secara komprehensif serta mengevaluasi alternatif kebijakan yang relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang.

Hasil Pembahasan

3.1 Tinjauan Teoritis dan Konseptual Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan perkotaan merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan teoritis multidisiplin untuk memahami dinamika dan solusinya. Menurut Todaro dan Smith (2015), kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan rendah, tetapi juga dari ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan dasar, ketiadaan akses terhadap layanan publik, dan kerentanan terhadap guncangan ekonomi. Teori ini relevan dengan kondisi Kota Tangerang di mana meskipun PDRB per kapita terus meningkat, ketimpangan dan kerentanan ekonomi masih tinggi.

Konsep kemiskinan multidimensi yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2011) memberikan kerangka analitis yang komprehensif dengan indikator kesehatan, pendidikan, standar hidup, dan ketahanan ekonomi. Di Kota Tangerang, dimensi kemiskinan tampak pada keterbatasan akses terhadap perumahan layak, sanitasi, pendidikan berkualitas, dan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal.

Teori pemberdayaan (empowerment) dari Narayan (2005) menekankan pentingnya peningkatan aset, kapasitas, dan partisipasi masyarakat miskin dalam proses pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka logis (logical framework) Pemerintah Kota Tangerang yang mencakup tiga strategi: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.

3.2 Analisis Pendekatan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan instrumen kebijakan utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya dalam konteks wilayah perkotaan dengan biaya hidup yang tinggi seperti Kota Tangerang. Kebijakan perlindungan sosial berperan dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan mencegah kelompok rentan jatuh kembali ke kondisi miskin akibat guncangan ekonomi. Peningkatan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS), baik dalam bentuk bantuan sembako maupun bantuan tunai, menjadi relevan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Selain itu, jaminan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan

pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan sosial untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

3.3 Analisis Tata Kelola Data Sosial Ekonomi

Ketepatan sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas data sosial ekonomi. Pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan upaya strategis untuk menyatukan basis data antara pemerintah pusat dan daerah serta meminimalkan tumpang tindih penerima bantuan. Percepatan verifikasi dan validasi DTSEN hingga tingkat kelurahan menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah, termasuk bantuan sosial dan bantuan modal usaha, benar-benar diterima oleh penduduk miskin dan miskin ekstrem hasil validasi lapangan.

3.4 Analisis Ketenagakerjaan dan Peningkatan Pendapatan

Kemiskinan di Kota Tangerang tidak terlepas dari keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, terutama bagi penduduk usia produktif. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan pendapatan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan kegiatan ekonomi produktif. Integrasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan industri manufaktur dan jasa di Kota Tangerang menjadi pendekatan penting agar pelatihan kerja yang diberikan selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan

mampu meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja lokal.

3.5 Analisis Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pendekatan pengembangan wilayah berperan penting dalam mengatasi kemiskinan yang terkonsentrasi secara spasial. Ketimpangan distribusi investasi dan pembangunan berpotensi membentuk kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertentu, khususnya pada kawasan padat dan wilayah dengan keterbatasan prasarana sosial. Kebijakan pengembangan wilayah yang relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan meliputi pengendalian laju ekspansi pembangunan perkotaan, optimalisasi investasi publik di kota-kota kecil dan menengah, serta peningkatan investasi publik untuk prasarana sosial di wilayah perdesaan dan kantong kemiskinan. Pelaksanaan desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk merancang intervensi pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

3.6 Logical Framework Percepatan Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan kondisi dan permasalahan kemiskinan yang telah diidentifikasi serta analisis kebijakan pada subbab sebelumnya, terdapat beberapa alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Arah kebijakan tersebut dapat dirangkum dalam suatu *logical framework* percepatan penurunan kemiskinan.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Logical framework percepatan penurunan kemiskinan di Kota Tangerang disusun berdasarkan tiga strategi utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan di tingkat wilayah kelurahan. Ketiga strategi tersebut saling terkait dan dirancang secara terpadu untuk menghasilkan penurunan kemiskinan yang bersifat berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi rumah tangga, ketenagakerjaan, maupun kualitas lingkungan permukiman.

Strategi mengurangi beban pengeluaran diarahkan melalui penyediaan bantuan sosial serta penjaminan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan. Strategi meningkatkan pendapatan difokuskan pada penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat usia kerja. Sementara itu, strategi mengurangi kantong kemiskinan menekankan intervensi berbasis wilayah kelurahan melalui peningkatan akses

terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Masalah :

1. Salah sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang masih terkendala oleh keterbatasan akurasi dan integrasi data kelompok miskin dan rentan. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih penerima bantuan serta exclusion error terhadap kelompok yang seharusnya menerima intervensi. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan verifikasi dan validasi data melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar sinkron antara pemerintah pusat dan daerah (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029; DTSEN, 2026).

2. Distribusi kemiskinan di Kota Tangerang terkonsentrasi pada beberapa kecamatan seperti Neglasari, Karawaci, dan Pinang, yang secara kumulatif menyumbang lebih dari sepertiga total penduduk miskin kota. (DTSEN 2026; BPS Kota Tangerang, 2025).

3. Tingginya Beban Pengeluaran Rumah Tangga Perkotaan Garis kemiskinan Kota Tangerang pada tahun 2025 mencapai Rp838.535 per kapita per bulan, tertinggi kedua di Provinsi Banten. Tingginya biaya hidup di kawasan perkotaan menyebabkan rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat rentan kembali jatuh miskin ketika terjadi guncangan ekonomi seperti inflasi dan kenaikan harga pangan, sehingga menghambat percepatan penurunan kemiskinan (BPS Kota Tangerang, 2025).

4. Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, struktur alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Tangerang tahun 2025

menunjukkan dominasi strategi pengurangan beban pengeluaran (76,48%), sementara strategi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan hanya memperoleh porsi sekitar 1%. ini menyebabkan dampak kelompok miskin secara berkelanjutan (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029).

Tabel Penilaian USG

Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total
Masalah 1	3	3	2	8
Masalah 2	5	5	5	15
Masalah 3	4	4	3	11
Masalah 4	4	4	4	12

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis USG, masalah utama adalah **Masalah Nomor 2**: Tingginya jumlah usia produktif yang tidak bekerja atau bersekolah di kantong kemiskinan utama. Masalah ini mendapat skor urgensi dan growth tertinggi karena langsung memicu siklus kemiskinan baru dan berpotensi meluas.

Penyebab Masalah Level 1

Masalah Utama: Konsentrasi kemiskinan dan pengangguran usia produktif

2a. Terbatasnya akses kerja formal bagi penduduk miskin usia produktif Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi (Neglasari, Karawaci, dan Pinang) juga memiliki jumlah usia produktif tidak bekerja atau tidak bersekolah yang tinggi. Hal ini

menunjukkan keterbatasan akses penduduk miskin terhadap lapangan kerja formal yang stabil, meskipun Kota Tangerang merupakan pusat industri regional (DTSEN 2026; RPJMD Kota Tangerang 2025–2029).

2b. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja miskin Sebagian besar penduduk miskin usia produktif di Kota Tangerang memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah, yang tidak sejalan dengan kebutuhan industri manufaktur dan jasa modern. RPJMD Kota Tangerang menegaskan adanya mismatch antara kompetensi tenaga kerja lokal dan kebutuhan pasar kerja, yang berkontribusi terhadap tingginya pengangguran struktural (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029; BPS Kota Tangerang, 2025).

2c. Lemahnya intervensi pemberdayaan ekonomi produktif di wilayah kantong kemiskinan Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Tangerang masih didominasi oleh pendekatan pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, sementara program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi produktif memperoleh porsi anggaran yang sangat kecil. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga miskin sulit keluar dari ketergantungan bantuan (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029).

Penyebab Masalah Level 2

2a1. Ketidakterpaduan lokasi permukiman miskin dengan pusat kegiatan ekonomi Wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi didominasi oleh permukiman padat dan kawasan dengan keterbatasan akses infrastruktur ekonomi, sehingga mobilitas tenaga kerja menuju pusat industri menjadi tidak efisien (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029; Dinas PUPR Kota Tangerang).

2a2. Tingginya biaya hidup dan transportasi perkotaan

Tingginya garis kemiskinan Kota Tangerang mencerminkan beban biaya hidup yang tinggi, termasuk biaya transportasi untuk bekerja, yang menjadi hambatan bagi penduduk miskin usia produktif untuk mengakses pekerjaan formal secara berkelanjutan (BPS Kota Tangerang, 2025).

2a3. Terbatasnya layanan penempatan kerja berbasis kelurahan

Sistem penyaluran kerja dan informasi lowongan masih terpusat dan belum menjangkau kelompok miskin di tingkat kelurahan secara efektif, sehingga peluang kerja formal tidak merata secara spasial (Disnaker Kota Tangerang; RPJMD 2025–2029).

2b1. Tingginya angka putus sekolah usia produktif di kantong kemiskinan

Data menunjukkan korelasi antara jumlah penduduk miskin dan tingginya usia produktif yang tidak bekerja atau tidak bersekolah, yang mengindikasikan masalah putus sekolah sebagai faktor utama rendahnya kualitas SDM (DTSEN 2026; BPS Kota Tangerang).

2b2. Keterbatasan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal

Program pelatihan kerja yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan sektor industri unggulan Kota Tangerang, sehingga lulusan pelatihan sulit terserap ke pasar kerja (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029; Disnaker Kota Tangerang).

2b3. Rendahnya partisipasi kelompok miskin dalam program peningkatan keterampilan

Kelompok miskin di wilayah padat dan kumuh menghadapi keterbatasan akses informasi, waktu,

dan biaya untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan secara berkelanjutan (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029).

2c1. Dominasi bantuan sosial konsumtif dibandingkan bantuan produktif

Sebagian besar anggaran penanggulangan kemiskinan dialokasikan untuk pengurangan beban pengeluaran, sementara pemberdayaan ekonomi produktif hanya memperoleh sekitar 1 persen dari total anggaran, sehingga dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi masyarakat miskin menjadi terbatas (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029).

2c2. Lemahnya pendampingan usaha mikro di wilayah miskin

Program UMKM belum secara spesifik menyasar rumah tangga miskin di kantong kemiskinan, baik dari sisi pendampingan, akses permodalan, maupun kesinambungan usaha (RPJMD Kota Tangerang 2025–2029).

2c3. Keterbatasan kualitas lingkungan permukiman miskin

Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH), sanitasi buruk, dan keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan, yang menurunkan produktivitas penduduk usia produktif dan membatasi peluang peningkatan pendapatan (Dinas PUPR/Perkim Kota Tangerang; RPJMD 2025–2029).

Penentuan Akar Masalah

- Akar Masalah 1:
2b1 : Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya pendidikan penduduk miskin usia produktif
(DTSEN 2026; BPS Kota Tangerang)
- Akar Masalah 2:
2b : Rendahnya kualitas dan

relevansi keterampilan tenaga kerja miskin terhadap kebutuhan industri Kota Tangerang

(RPJMD Kota Tangerang 2025–2029)

- Akar Masalah 3:
Masalah Utama : Konsentrasi kemiskinan dan pengangguran usia produktif di wilayah tertentu
(BPS Kota Tangerang 2025; DTSEN 2026)

Rumusan Pernyataan Masalah (Problem Statement)

Penurunan kemiskinan di Kota Tangerang berlangsung relatif lambat karena kemiskinan didominasi oleh penduduk usia produktif dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akibat keterbatasan akses terhadap pelatihan kerja yang relevan, lapangan kerja formal, serta lemahnya pemberdayaan ekonomi produktif berbasis wilayah, sehingga menghambat transformasi ekonomi masyarakat miskin .

PILIHAN KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peningkatan Skema Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Alternatif kebijakan ini berfokus pada peningkatan cakupan dan volume bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan sembako maupun bantuan tunai, dengan tujuan utama mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks Kota Tangerang yang memiliki biaya hidup relatif tinggi, skema JPS berperan penting sebagai instrumen perlindungan sosial untuk mencegah penurunan kesejahteraan rumah tangga miskin dan hampir miskin.

Kelebihan dari alternatif ini adalah kemampuannya dalam memberikan dampak cepat dan langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat miskin. Namun demikian, kebijakan ini memiliki keterbatasan karena cenderung bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat apabila tidak disertai dengan intervensi produktif.

Alternatif 2: Akselerasi DTSEN dan Intervensi Berbasis Pendampingan

Alternatif ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola data sosial ekonomi melalui percepatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga tingkat kelurahan. Dengan basis data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan menjangkau penduduk miskin serta miskin ekstrem yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, alternatif ini menggabungkan bantuan sosial dengan intervensi produktif berupa pemberian bantuan modal usaha berbasis pendampingan. Pendekatan pendampingan bertujuan meningkatkan kapasitas usaha penerima bantuan, sehingga intervensi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Alternatif ini dinilai memiliki potensi dampak yang lebih berkelanjutan karena mengatasi permasalahan kemiskinan dari sisi struktural, khususnya ketepatan sasaran dan keberlanjutan intervensi.

Alternatif 3: Integrasi BLK dengan Kebutuhan Industri Lokal

Alternatif kebijakan ini diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui penyelarasan pelatihan kerja dengan kebutuhan industri manufaktur dan jasa di Kota Tangerang. Dengan integrasi tersebut, pelatihan yang diberikan oleh Balai

Latihan Kerja (BLK) diharapkan lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya penduduk miskin usia produktif.

Kelebihan alternatif ini terletak pada kontribusinya dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan industri, waktu pelatihan, serta kemampuan peserta untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, sehingga dampaknya cenderung bersifat menengah hingga jangka panjang.

Alternatif 4: Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan PMKS

Alternatif ini memperkuat peran Satpol PP dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pendekatan humanis dan rehabilitatif. Penanganan PMKS tidak hanya dilakukan melalui penertiban ruang publik, tetapi juga melalui rujukan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan, rehabilitasi sosial, dan pelatihan keterampilan.

Pendekatan ini berkontribusi dalam mengurangi kerentanan sosial dan mencegah reproduksi kemiskinan di ruang-ruang publik. Namun, kebijakan ini lebih bersifat korektif terhadap dampak sosial kemiskinan dan belum secara langsung menjangkau akar permasalahan ekonomi rumah tangga miskin secara luas.

Alternatif 5: Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Kantong Kemiskinan

Alternatif ini menekankan intervensi pengentasan kemiskinan berbasis wilayah kelurahan, khususnya pada kawasan yang memiliki konsentrasi kemiskinan tinggi. Kebijakan ini meliputi peningkatan prasarana sosial,

pengendalian ekspansi perkotaan, serta optimalisasi investasi publik untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Kelebihan dari alternatif ini adalah kemampuannya dalam menurunkan kemiskinan secara spasial dan memperbaiki kualitas lingkungan permukiman. Namun, dampak kebijakan ini cenderung bersifat jangka menengah hingga panjang dan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil permasalahan dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kota Tangerang tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan bantuan, tetapi lebih bersifat struktural, terutama terkait ketidaktepatan sasaran intervensi dan lemahnya keterpaduan antarprogram. Kondisi ini menyebabkan bantuan sosial, program ketenagakerjaan, dan intervensi wilayah belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat mengatur untuk memastikan ketepatan sasaran, integrasi lintas sektor, dan keberlanjutan intervensi pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang.

Kebijakan Akselerasi DTSEN dan Intervensi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pendampingan

Berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan pada Bab III, Akselerasi DTSEN dan Intervensi Berbasis Pendampingan dipilih sebagai kebijakan yang direkomendasikan karena memperoleh skor tertinggi dan dinilai paling mampu menjawab permasalahan utama kemiskinan di Kota Tangerang. Kebijakan ini direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai kebijakan yang bersifat mengatur dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengikat seluruh perangkat

daerah terkait dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

Tujuan Kebijakan

Menjamin ketepatan sasaran intervensi pengentasan kemiskinan melalui satu data yang tervalidasi hingga tingkat kelurahan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui intervensi berbasis pendampingan.

Sasaran dan Penentu Kebijakan

- **Penentu kebijakan:** Wali Kota Tangerang
- **Pelaksana utama:** Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM
- **Unit pendukung:** Kecamatan dan Kelurahan
- **Sasaran kebijakan:** Penduduk miskin
- dan miskin ekstrem hasil verifikasi dan validasi DTSEN

Substansi Pengaturan Kebijakan

Kebijakan ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan DTSEN sebagai Satu-satunya Basis Data Resmi.

Pemerintah Kota Tangerang wajib menggunakan DTSEN sebagai satu-satunya basis data dalam penentuan penerima bantuan sosial, bantuan modal usaha, pelatihan kerja, dan intervensi pengentasan kemiskinan lainnya.

2. Kewajiban Verifikasi dan Validasi

DTSEN hingga Tingkat Kelurahan

Setiap kelurahan diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi lapangan secara berkala terhadap data penduduk miskin dan miskin ekstrem

untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual.

3. Integrasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data

Seluruh perangkat daerah wajib menyelaraskan program perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN agar tidak terjadi tumpang tindih dan salah sasaran.

4. Intervensi Bantuan Modal Usaha Berbasis Pendampingan

Bantuan modal usaha bagi penduduk miskin dan miskin ekstrem diberikan secara selektif berdasarkan hasil validasi DTSEN dan wajib disertai pendampingan usaha yang terstruktur untuk mendorong kemandirian ekonomi.

5. Penetapan Wilayah Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kota Tangerang menetapkan kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagai wilayah prioritas intervensi berdasarkan hasil analisis DTSEN.

Tahapan Implementasi Kebijakan

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang diusulkan, pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (1–6 bulan) Sinkronisasi dan integrasi data sosial ekonomi antara Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penetapan sasaran intervensi pengentasan kemiskinan berbasis DTSEN.

2. Jangka Menengah (6–12 bulan) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi masyarakat

yang telah menerima bantuan modal usaha, untuk memastikan keberlanjutan usaha dan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, ditetapkan sebagai berikut:

1. Penetapan regulasi oleh Wali Kota yang mengatur penggunaan DTSEN dan integrasi program pengentasan kemiskinan.

2. Pemutakhiran dan verifikasi DTSEN hingga tingkat kelurahan secara terpadu.

3. Penyesuaian program lintas perangkat daerah berdasarkan hasil DTSEN yang telah tervalidasi.

4. Pelaksanaan intervensi berbasis pendampingan, khususnya bantuan modal usaha dan akses pelatihan kerja.

5. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Penurunan kemiskinan di Kota Tangerang menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada tingginya persentase kemiskinan, melainkan pada perlambatan penurunannya dan konsentrasi kemiskinan pada kelompok usia produktif di wilayah tertentu. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta dominasi kebijakan yang masih berorientasi pada bantuan konsumtif. Struktur intervensi yang belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi turut menghambat efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan tata kelola data melalui akselerasi DTSEN dan integrasi program lintas sektor

Penurunan kemiskinan di Kota Tangerang menghadapi tantangan struktural yang tidak semata-mata tercermin dari persentase kemiskinan, tetapi dari konsentrasi kemiskinan pada kelompok usia produktif yang tidak bekerja atau tidak bersekolah di wilayah tertentu. Kondisi ini menjadi faktor kunci yang memperkuat siklus kemiskinan karena kelompok usia produktif secara ekonomi seharusnya berperan sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga; ketika mereka tidak terserap dalam pasar kerja atau kegiatan ekonomi produktif, kapasitas rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan menjadi terbatas, sehingga meningkatkan ketergantungan terhadap bantuan sosial dan memperbesar kerentanan terhadap guncangan ekonomi. Dalam jangka panjang, pengangguran usia produktif juga menimbulkan efek degradasi keterampilan (skill depreciation), hilangnya pengalaman kerja, serta menurunnya daya saing tenaga kerja lokal, yang pada akhirnya mempersempit peluang mobilitas ekonomi dan memperbesar risiko kemiskinan kronis antar generasi. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, serta struktur kebijakan yang masih didominasi intervensi konsumtif dibandingkan penguatan kapasitas produktif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data melalui akselerasi DTSEN yang terintegrasi dengan intervensi lintas sektor, serta kombinasi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis pendampingan, menjadi strategi krusial untuk mengaktifkan kembali potensi ekonomi usia produktif sebagai penggerak transformasi kesejahteraan rumah tangga miskin secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). *Multidimensional poverty measurement and analysis*. Oxford Poverty & Human Development Initiative.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2025–2029*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang. (2025). *Data kemiskinan Kota Tangerang tahun 2020–2025*.
- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. (2025). *Data ketenagakerjaan dan pelatihan kerja*.
- Dinas Sosial Kota Tangerang. (2025). *Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan intervensi sosial*.
- Dunn, W. N. (1999). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. (2025). *Slide presentasi: Peta prioritas wilayah pengentasan kemiskinan*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.
- Narayan, D. (Ed.). (2005). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. The World Bank.
- Pemerintah Kota Tangerang. (2025). *Data Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) September 2025*.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.